

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Setiawan. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reforma Agraria)*. LaksBang Justitia : Yogyakarta. 2019.
- Anshori Ilyas, dkk. *Kontrak Publik*. Prenadamedia Group : Jakarta. 2021.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Djambatan : Jakarta. 1995.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan dan Pelaksanaannya*. Djambatan : Jakarta. 2008.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional*. Djambatan : Jakarta. 2007.
- Elza Syarif. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Kepustakaan Populer Gramedia : Jakarta. 2014.
- Florianus Sangsun, S.P. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media : Jakarta. 2008.
- Julius Sembiring. *Tanah Negara Edisi Revisi*. Kencana : Jakarta. 2016.
- Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka : Jakarta. 2009.
- Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Bina Aksara : Jakarta. 1984.
- Parlindungan, A.P. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Mandar Maju : Bandung. 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana : Jakarta. 2006.
- Philipus Hadjon, M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu : Surabaya. 1987.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta, 1984.
- Supriyadi. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Prestasi Pustaka : Jakarta. 2010.
- Suyanto. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakad Media Publishing : Jakarta. 2019.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2012.

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2011.

Van Apeldoorn, L.J. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Revika Aditama : Bandung. 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Jurnal dan Sumber Website

Annisa Dwilestari. *Kepastian Hukum Hak-Hak Barat yang Belum Didaftarkan Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25.2 2019.

- Eman Ramelan. *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Haris Yonatan Parmahan Sibuea. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali" *Jurnal Negara Hukum* Volume 2 Nomor 2. 2011.
- Joyo Winoto. *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial (Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional)*. Bogor 1 September 2007.
- Siti Romlah. *Pengelolaan Aset Daerah atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016*. 2018.
- Singgih Hartanto, Status Hukum Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berupa Tanah yang Terletak di Kota Makassar, 2022
- Sri Susiyanti Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah." *Hasanuddin Law Review* 1.1.
- Urip Santoso, "Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah", *Jurnal Era Hukum* No. 1, 15 September 2007, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko H, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Dalam Aspek Wewenang", *Jurnal Era Hukum*, Nomor 3, Mei 2008, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.